

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di Asia. Perkembangannya dipantau oleh banyak investor dari seluruh dunia. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian dunia yaitu sumber daya yang melimpah. Sektor industri menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor. Sudah banyak perusahaan di Indonesia yang *go public* di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tersebut memiliki kewajiban dalam penyampaian mengenai informasi dari kegiatan yang telah dilakukannya secara publik dengan wujud laporan keuangan tahunan (Syaifurakhman & Laksito, 2016).

★ Untuk menyajikan informasi yang ditujukan kepada pemegang saham maupun calon investor, perusahaan dituntut lebih transparan dalam penyampaian informasi pada laporan keuangan tahunan. Informasi tersebut dibutuhkan oleh investor untuk menentukan keputusan investasinya. Informasi pada laporan keuangan terdiri atas aspek finansial dan non finansial. Hal ini menjadi perhatian serius oleh stakeholder dikarenakan beberapa kecurangan akuntansi menimpa perusahaan besar. Informasi yang disajikan juga harus mudah untuk diakses, sehingga tidak terjadi perbedaan

informasi. Pengungkapan informasi yang transparan merupakan suatu sistem manajemen risiko bagi perusahaan. Manajemen risiko merupakan aktivitas mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko yang mengakibatkan kerusakan atau kerugian bagi perusahaan. Pemahaman risiko yang lebih baik berakibat lebih mudahnya risiko untuk dikendalikan (Rifani & Astuti, 2019).

Dalam suatu proses untuk mencapai tujuan pasti akan ditemui suatu hal yang disebut risiko. Risiko akan ditemui dalam prosesnya untuk mencapai tujuan bisnis. Risiko bersifat tidak pasti yang akan berdampak terhadap masa depan dalam proses pencapaian tujuan. Pada awalnya risiko dipandang negatif apabila dibandingkan dengan sekarang yaitu risiko dipandang baik secara positif maupun negatif dalam mengenai beberapa peristiwa. Karena terapat berbagai pendapat mengenai risiko, maka investor suatu perusahaan memerlukan informasi lanjut mengenai *risk disclosure* atau pengungkapan risiko untuk membuat keputusan dalam melakukan kegiatan berbisnis serta berinvestasi pada perusahaan tersebut (Linsley & Shrives, 2006).

Pengungkapan risiko merupakan salah satu faktor penting dalam pelaporan keuangan perusahaan. Hal ini dikarenakan pengungkapan tersebut mencangkup informasi tentang pengelolaan risiko dan berdampak bagi perusahaan di masa mendatang. Untuk membantu mengatasi ketidakpercayaan publik, komunikasi yang lebih baik diperlukan dan

merupakan regulator yang mulai beraksi (Sholikhah & Sari, 2020). Manajer (*agent*) yang tidak menyampaikan informasi terkait kondisi *real* perusahaan kepada *principal* (pemilik perusahaan) dapat menimbulkan konflik keagenan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan informasi yang diperoleh pemilik perusahaan dengan manajer yang disebut sebagai asimetri informasi (Sholikhah & Sari, 2020). Asimetri informasi akan menimbulkan perbedaan dalam pengambilan keputusan oleh pihak *stakeholder* yang mungkin dapat merugikan pihak terkait (Rifani & Astuti, 2019). Transparansi komunikasi keuangan dapat meminimalkan konflik keagenan antara pemenang saham dan manajer yang melekat dalam pemisahan kepemilikan dan control perusahaan (Jensen & Meckling, 2012).

Peraturan mengenai *risk disclosure* di Indonesia diatur dalam Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (2006) atau BAPEPAM dan LK Nomor : Kep-134/BL/2006 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten dan perusahaan publik. Peraturan lain terkait risiko keuangan adalah dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK No.60 tentang Instrumen keuangan : penyajian dan pengungkapan. Dalam Ikatan Akuntan Indonesia (2013) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK No. 60 disebutkan bahwa informasi mengenai sifat dan tingkat risiko yang timbul dari instrumen keuangan dapat berupa pengungkapan kualitatif dan pengungkapan kuantitatif.

Survei Norton Rose yang bertema *Indonesia Inward Investment: An Industry Survey* (2011: 16) menyatakan bahwa 57% responden dari pelaku industri di hampir seluruh dunia menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara tujuan berinvestasi dengan risiko tinggi yang disebabkan oleh penegakan hukum yang lemah, tingginya tingkat korupsi serta keterbatasan infrastruktur menjadi alasan Indonesia sebagai salah satu negara dengan *High Risk Level*.

Indonesia termasuk dalam negara dengan tingkat risiko yang tinggi dibandingkan dengan negara lain juga diungkapkan melalui Survey JETRO (Japan External Trade Organization), dimana risiko dari segi infrastruktur, biaya pekerja, hukum di Indonesia yang masih sangat lemah, maupun risiko politik menjadi alasan mengapa Indonesia termasuk *High Risk Level*.

Berikut tabel berdasarkan hasil dari Survey Jetro:

Tabel 1.1
Risiko dan Masalah tiap Negara Berdasarkan Survey Jetro

<i>High level of foreign exchange risk</i>	<i>Inadequate infrastructure</i>	<i>Undeveloped legal system and problems in application of law</i>	<i>High or rising labor cost</i>	<i>Labor difficulties</i>	<i>Political Risk</i>
--	----------------------------------	--	----------------------------------	---------------------------	-----------------------

China	12.3%	11.6%	45.1%	49.5%	34.1%	64.6%
Thailand	10.4%	10.5%	6.5%	30.1%	12.7%	15.3%
Malaysia	9.7%	10.0%	6.8%	15.9%	9.3%	2.1%
Indonesia	12.4%	36.4%	27.2%	21.0%	22.1%	18.5%
Philippines	8.8%	28.6%	15.6%	7.3%	8.8%	14.4%
Vietnam	14.2%	43.6%	27.8%	18.1%	11.9%	4.4%

Sumber: Survey Jetro 2013

Persentase risiko dihitung tinggi jika melebihi 20%. Indonesia mencapai 36% berisiko tinggi di infrastrukturnya, 27,2% risiko di *legal system* dan hukum Indonesia yang masih sangat lemah. Belum juga masalah biaya pekerja yang mencapai 21% urutan ketiga setelah China dan Thailand. Dibandingkan dengan Malaysia, Indonesia memiliki tingkat risiko yang jauh lebih tinggi. Hal hal seperti ini yang membuat Indonesia tergolong dalam *High Risk Jurisdiction*.

Dengan demikian, artinya ketika suatu negara sudah diindikasikan sebagai *High Risk Jurisdiction*, maka biaya hutang (*cost of debt*) yang ditetapkan oleh kreditor pun akan besar pula. Biaya utang lebih tinggi di beberapa negara berkembang dengan tingkat risiko tinggi dibandingkan dengan negara industri, terutama karena kondisi ekonomi. Biaya utang adalah tingkat pengembalian yang diinginkan kreditor saat memberikan pendanaan kepada perusahaan (Agustami & Cahyani Yunanda, 2014).

Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya suatu perusahaan berdasarkan nilai ekuitas, penjualan, atau asetnya (Saad & Abdillah, 2019). Menurut I. P. Sari & Susanti (2018) ukuran perusahaan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi risiko keuangan, karena ukuran perusahaan banyak diteliti oleh para ahli semakin besar perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi untuk memenuhi kebutuhan para pemegang kepentingan. Perusahaan ukuran besar juga cenderung untuk menjadikan praktik *corporate governance* dengan lebih baik dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hal ini berhubungan dengan besarnya tanggung jawab perusahaan kepada *stakeholder* karena dasar kepemilikan yang lebih luas. Selain itu semakin besar perusahaan, maka semakin besar pula risiko yang dihadapinya, termasuk keuangan, reputasi dan risiko informs. Dey et al (2018) juga berpendapat sama yaitu ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko keuangan. Sedangkan penelitian Bufarwa et al (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko keuangan.

Leverage merupakan perbandingan antara utang dan aset yang menunjukkan beberapa bagian aset yang digunakan untuk menjamin utang (Hapsoro & Annisa, 2017). Keuangan perusahaan yang diukur dengan total utang terhadap total aset, dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan risiko keuangan, sehingga perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi cenderung memiliki leverage yang tinggi, lebih spekulatif, dan lebih

berisiko (Dey et al., 2018). Hasil penelitian Nandi & Ghosh (2013) menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko keuangan yang diperkirakan akan memengaruhi luas pengungkapan sukarela karena perusahaan dengan leverage memiliki dorongan yang lebih besar untuk memenuhi permintaan informasi oleh kreditur jangka panjang, sedangkan leverage berpengaruh negatif menurut penelitian Dey et al (2018).

Likuiditas merupakan gambaran kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya (Daniel, 2013). Penelitian Nandi & Ghosh (2013) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko keuangan karena likuiditas merupakan faktor penting untuk mengungkapkan lebih banyak informasi tentang kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, serta bersaksi bahwa perusahaan itu berjalan untuk menghilangkan ketakutan investor dan kreditur, menghilangkan sedangkan menurut Dey et al (2018) likuiditas justru tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko keuangan.

Kualitas auditor merupakan auditor yang mempunyai nama baik dan mempertahankan reputasinya dengan memberikan kualitas audit yang baik (Gunawan & Zakiyah, 2017). Kualitas auditor secara umum memiliki arti kemungkinan dari auditor untuk mendeteksi dan melaporkan salah satu material yang terdapat dalam laporan keuangan klien atau sistem akuntansi (Saadah, 2018). Kantor akuntan publik yang besar dan berkualitas dapat

mendorong perusahaan agar menyajikan pengungkapan informasi yang lebih luas demi mempertahankan reputasi kantor akuntan publik tersebut (Rifani & Astuti, 2019). Hasil penelitian Sholikhah & Sari (2020) menunjukkan bahwa kualitas auditor berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko keuangan, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Setyawan (2019) diperoleh hasil negatif tentang pengaruh reputasi auditor terhadap pengungkapan risiko keuangan.

Penelitian sebelumnya Aliabadi et al (2009) berpendapat bahwa perusahaan dengan tantangan keuangan dan volatilitas harga saham yang tinggi akan lebih mungkin untuk mengadopsi ERM (*Enterprise Risk Management*) dalam mengelola dan mengungkapkan risiko mereka. Studi empiris sebelumnya Dey et al (2018), yang meneliti hubungan antara tingkat pengungkapan dan atribut spesifik perusahaan telah menunjukkan bahwa ada beberapa karakteristik perusahaan yang dapat mempengaruhi luasnya pengungkapan dalam laporan tahunan. Berdasarkan penelitian dan studi empiris sebelumnya tentang pengungkapan, peneliti telah memilih empat karakteristik (ukuran perusahaan, leverage, likuiditas, dan kualitas auditor) pada penelitian ini untuk menguji hubungannya dengan tingkat pengungkapan risiko keuangan pada perusahaan yang terdaftar di BEI.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik pokok masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko keuangan?
2. Apakah leverage berpengaruh negatif terhadap pengungkapan risiko keuangan?
3. Apakah likuiditas berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko keuangan?
4. Apakah kualitas auditor berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko keuangan?

C. Pembatasan Masalah

1. Luas lingkup hanya meliputi informasi seputar pengungkapan risiko keuangan.
2. Informasi yang disajikan : Ukuran perusahaan, leverage, likuiditas, dan kualitas auditor terhadap pengungkapan risiko keuangan.
3. Data yang digunakan berasal dari perusahaan sektor *properties & real estate* yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai:

- a. Untuk mengetahui pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap pengungkapan risiko keuangan.
- b. Untuk mengetahui pengaruh negatif leverage terhadap pengungkapan risiko keuangan.
- c. Untuk mengetahui pengaruh positif likuiditas terhadap pengungkapan risiko keuangan.
- d. Untuk mengetahui pengaruh positif kualitas auditor terhadap pengungkapan risiko keuangan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi investor dalam menanamkan modalnya dilihat dari pengaruh ukuran perusahaan, leverage, likuiditas, dan kualitas auditor terhadap pengungkapan risiko keuangan.

- b. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang praktik pengungkapan risiko keuangan yang dapat digunakan sebagai pertimbangan manajemen khususnya mengenai pengaruh ukuran perusahaan, leverage, likuiditas, dan kualitas auditor terhadap pengungkapan risiko keuangan.

c. Bagi akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi bagi kalangan akademisi mengenai pengungkapan risiko keuangan, khususnya mengenai pengaruh ukuran perusahaan, leverage, likuiditas, dan kualitas auditor. Serta menjadi bahan pertimbangan lain apabila akan diadakan penelitian lebih lanjut.

